

# Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM Menghadapi MEA

HARDI<sup>1</sup>, ZAHARMAN<sup>2</sup>

Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581  
E-mail : hardi@unilak.ac.id; zaharmanunilak@gmail.com

**Abstract:** *The research was conducted in Pekanbaru City with the aim to analyze the Strategy of Pekanbaru City Government in empowerment and Development of UMKM and optimize the role of Pekanbaru Municipal Government related to the Empowerment and Development of UMKM in facing Asean Economic Community (MEA) then how empowerment done, coaching conducted by Pekanbaru city government also related to contributions from APBD. The method used in this research is quantitative and qualitative analysis that is by analyzing the strategy of empowerment and fostering of UMKM perpetrator in facing MEA by comparing between accepted by UMKM and fund which have been provided by Pekanbaru city government through APBD. The results of empowerment and development strategies of SMEs Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Riau especially in Pekanbaru city is considered not able to develop various businesses, especially in the face of free competition in Southeast Asia in 2016. and the problem of licensing is still difficult, the number of bureaucracy which is difficult and the process has not been educated to all MSMEs*

**Keywords:** *Strategy, Empowerment, Development, Small and Medium Enterprises*

Dibukanya Gerbang pasar di ASEAN dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada awal tahun 2016, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan sebagian masyarakat Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru dalam mencukupi kebutuhan hidup. Selain masyarakat yang bekerja di instansi pemerintah dan swasta.

Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pada saat krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam menjalankan usahanya.

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai

berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).

Pemberdayaan UMKM Biasa dilakukan oleh *stakeholder*, keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Sejauh ini keterlibatan *stakeholder* UMKM antara lain terdiri

dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan Tinggi), keterlibatan yang ada masih bersikap sendiri-sendiri dan kurang intergratif antara *stakeholder* satu dengan yang lain.

Dilihat dari program dan anggaran Pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk UMKM setiap tahunnya dianggarkan untuk bantuan baik itu mesin pembinaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM, disisi lain dengan dianggarkannya berbagai kegiatan tentunya tidak terlepas dari output apa yang akan didapat oleh pemerintah, Lembaga pendidikan dan UMKM itu sendiri.

Sejatinya pemberdayaan UMKM merupakan gerakan sinergis antar Pemerintah dan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru. Namun pemerintah tetap memegang peranan terbesar dalam upaya pemberdayaan tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM telah diatur jelas dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana, data UMKM di Kota Pekanbaru bahwa jumlah UMKM di kota Pekanbaru tergolong cukup banyak bisa dilihat dari populasi yang ada dikota pekanbaru sekitar 1 juta penduduk, dari sisi perguruan tinggi melihat data tersebut adalah peluang untuk melakukan tri darma perguruan tinggi khusus pada Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat untuk mahasiswa dan Dosen, ini juga mencerminkan peran perguruan tinggi di Kota Pekanbaru terhadap UMKM, bisa diketahui segala keterbatasan dimiliki oleh UMKM dalam produksi, pemasaran, dan Modal usaha disini perguruan tinggi bisa bersinergi dalam memberdayakan UMKM sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik sebagai contoh perguruan tinggi bisa memanfaatkan UMKM untuk tempat magang/Praktek Kerja lapangan (PKL) bagi Mahasiswa

tidak terlepas juga bisa dimanfaatkan bagi dosen.

Perkembangan lainnya, dalam hal *Millenium Development Goals (MDGs)* 2015 pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres No. 3/ 2010 berisi program-program pembangunan yang berkeadilan, yang secara spesifik berisikan tiga hal, yaitu : Program pembangunan yang pro rakyat, yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMKM; Program pembangunan yang adil untuk semua, yaitu program keadilan yang memprioritaskan anak-anak, perempuan, keluarga miskin, dan orang terpinggirkan, keadilan di bidang ketenagakerjaan, bantuan hukum, dan reformasi hukum dan peradilan; dan Program pembangunan untuk mencapai target-target MDGs, dimana indikator MDGs dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat.

Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Khususnya dikota Pekanbaru UMKM cukup banyak anantara kabupaten Kota di Provinsi Riau pada tahun berjumlah 93.161 berdasarkan dari dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, begitu banyak tetapi belum bisa bersaing dan berkembang, dilain sisi pemberian bantuan yang salurkan pemerintah belum begitu termafaat dengan baik, Pemerintah dan Dunia Pendidikan bisa bersinergi untuk menciptakan lulusan siap membuka lapangan pekerjaan buka lagi pencari kerja.

Upaya Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru oleh Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi agar terciptanya UMKM yang unggul memiliki daya saing untuk menghadapi MEA untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar bebas, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR) tepat sasaran, penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT).

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikannya sebagaimana diatur dalam undang-undang: Memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah). Milik warga negara Indonesia. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak

berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi (UU No. 9; 1995;5)

Kekuatan usaha kecil meliputi antara lain (Mulyadi; 2009;38) : Mengembangkan kreatifitas usaha baru; Melakukan Inovasi; Ketergantungan usaha besar terhadap usaha kecil; Daya tahan pasca krisis tahun 1999.

Kelemahan usaha kecil (Mulyadi; 2009; 40) : Lemahnya ketrampilan manajemen; Tingkat kegagalan dan penyebabnya; Keterbatasan sumber daya. Terdapat cukup banyak peluang untuk berwirausaha mandiri saat ini, mandiri bukan hanya sebutannya saja, namun butuh realisasi yang sifatnya segera, entah itu dalam bentuk rencana tertulis maupun sebuah sikap cerdas dalam menyikapi masalah ekonomi dengan mengambil keputusan memilih mandiri berwirausaha daripada harus terus menerus bekerja untuk orang.

Secara lebih spesifik, permasalahan dasar yang dihadapi UMKM adalah *Pertama*, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. *Kedua* kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh sumber sumber permodalan yang memadai. *Ketiga*, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. *Keempat*, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). *Kelima*, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. *Keenam*, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. (Kuncoro, 2009)

Pemerintah perlu membuat kebijakan kelembagaan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi beroperasinya UKM. Untuk itu maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prawirokusumo (1999) mengemukakan beberapa hal yang harus mendapat

perhatian dalam pemberdayaan UKM: (a) kebijakan persaingan sehat dengan pengurangan distorsi pasar, (b) kebijakan ekonomi yang memberi peluang UKM dapat mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, dan (c) kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

Selanjutnya dukungan penguatan yang meliputi: peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan penguasaan informasi, peningkatan penguasaan permodalan, peningkatan penguasaan pasar, pengoptimalan organisasi dan manajemen, pencadangan tempat usaha, dan pencadangan bidang-bidang usaha.

Pemerintah daerah dapat memberdayakan UKM melalui pembuatan peraturan yang tepat. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya. Memang banyak UKM yang masih menghadapi kendala yaitu lingkungan yang tidak kondusif untuk berusaha. Misalnya, izin yang sulit atau penyogokan yang memberatkan usaha UKM. Jika ini dilakukan berarti pemerintah membantu UKM keluar dari kendala internal dan eksternal.

Dalam upaya pemberdayaan usaha kecil pemerintah membuat aturan kebijakan pendanaan. Aturan tersebut ditetapkan dalam rangka membantu UKM untuk bisa tumbuh lebih sehat (Prawirokusumo 1999). Pemerintah telah menetapkan peraturan dan kebijaksanaan untuk: (a) memperluas sumber pendanaan, (b) meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, dan (c) memberikan kemudahan dalam pendanaan.

Selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu: *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari/*Five finger philosophy*, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai *Agents of development* (agen pembangunan). Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan izin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit* (PEAC) Unit, perusahaan penjamin kredit. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi

UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bank komersial merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang prinsip kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagi kedua pihak.

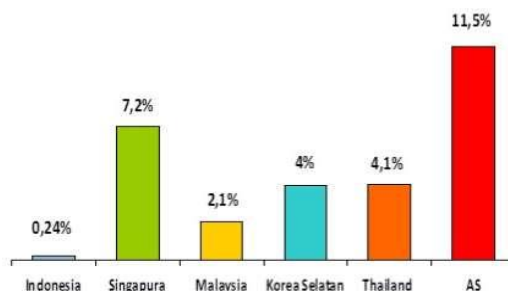
Dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016, masih banyak peluang UMKM untuk meraih pangsa pasar dan peluang investasi. Guna memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan terbesar bagi UMKM di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru adalah bagaimana mampu menentukan strategi dan pemberdayaan yang tepat guna memenangkan persaingan. Saat ini, struktur ekspor produk UMKM Indonesia banyak berasal dari industri pengolahan seperti furniture, makanan dan minuman, pakaian jadi atau garmen, industri kayu dan rotan, hasil pertanian terutama perkebunan dan perikanan, sedangkan di sektor pertambangan masih sangat kecil (hanya yang berhubungan dengan yang batu- batuan, tanah liat dan pasir).

Secara rinci barang ekspor UMKM antara lain alat-alat rumah tangga, pakaian jadi atau garmen, batik, barang jadi lainnya dari kulit, kerajinan dari kayu, perhiasan emas atau perak, mainan anak, anyaman, barang dari rotan, pengolahan ikan, mebel, sepatu atau alas kaki kulit, arang kayu/tempurung, makanan ringan dan

produk bordir. Sedangkan bahan baku produksi UMKM yang digunakan adalah bahan baku lokal sisanya dari impor seperti plastik, kulit dan beberapa zat kimia.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM di Kota Pekanbaru antara lain adalah masalah kurangnya bahan baku mesti harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Disamping itu pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non fisik seperti tingginya inflasi, skill, aturan perburuhan dan lain sebagainya.

Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta orang (menurut sensus 2010), ternyata hanya 0,24 persen adalah para wirausaha (interpreneur), atau hanya sekitar 400.000 orang yang berkecimpung dalam dunia usaha atau UMKM. Padahal agar perekonomian Indonesia dapat berkembang lebih cepat diperlukan lebih dari 2 persen dari jumlah penduduk sebagai wirausaha atau berkecimpung dalam UMKM. Singapura, sebuah negara kecil namun mempunyai 7 persen dari jumlah penduduknya merupakan wirausaha dan mempunyai banyak UMKM. Sedangkan Malaysia, lebih dari 2 persen jumlah penduduknya merupakan para interpreneur yang berkecimpung dalam berbagai usaha mikro. Sebagaimana Grafik 1 di bawah ini.



Sumber : Kompas, 14 Februari 2011

**Gambar 1:**  
**Jumlah Wirausaha di Beberapa Negara**

Tidak dipungkiri bahwa UMKM juga mempunyai kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja penerimaan negara terutama pajak. Perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai dengan 2012 juga terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata lebih dari 12 persen. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2012 dengan target penerimaan pajak sebesar 1016,2 triliun rupiah. Penerimaan pajak ini sebagian besar adalah dari Usaha Besar sedangkan potensi dari UMKM perlu digali secara Optimal baik pemerintah Pusat maupun daerah.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim

dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

Sabirin (2001) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan ini adalah usaha kredit mikro. Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena Kesuksesan pemberdayaan UMKM akan terwujud bila semua stakeholder berperan secara bersama-sama sesuai peran masing-masing. Baik regulator termasuk Pemerintah Daerah, para pelaku UMKM dan dunia perbankan yang dapat bekerja sesauai dengan tugas dan fungsinya, maka keberhasilan dan kemajuan UMKM akan cepat terlaksana. Sehingga pada akhirnya peningkatan penerimaan pajak dari sisi penggalan wajib pajak baru maupun nilai pajaknya akan terus meningkat.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru, hal ini dikarenakan saat ini merupakan gerbang masuk produk Impor dan ekspor bagi masyarakat khususnya di wilayah Sumatera, disamping itu penduduk Kota Pekanbaru sebagai latar belakang dan suku bangsa dalam mengelola UMKM. Hal ini tentu akan banyak persoalan dihadapi oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM menghadapi masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Data yang digunakan untuk Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM Menghadapi MEA adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Instansi Pemerintah terkait lainnya. Selain itu, digunakan pula data hasil penelitian yang ada, terutama hasil temuan dari para ahli dibidang UMKM.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi yaitu berupa buku-buku yang memuat data tentang UMKM, Observasi yaitu melakukan serangkaian pengamatan langsung ke pelaku UMKM dan wawancara yaitu dengan tanya jawab terhadap Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

Untuk membahas penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis Kualitatif digunakan pada analisis Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan dan Pembinaan UMKM menghadapi MEA dan Untuk mengoptimalkan Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Penelitian ini menggunakan kerangka Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan dan Pembinaan terdiri dari dua sisi, yaitu sisi Pemerintah Kota Pekanbaru dan sisi UMKM seperti yang terlihat pada gambar 3.1. kedua sisi pemerintah Kota Pekanbaru dan UMKM tersebut dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Sisi pemberdayaan dan Pembinaan UMKM dilakukan pemerintah kota Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor kebijakan oleh masing-masing instansi di Pemerintahan.

Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM sesuai anggaran yang diusulkan dan disetujui oleh eksekutif dan legislatif dan bagaimana optimalisasi Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bisa

berjalan dengan teratur dan terus menerus sehingga UMKM bisa mandiri sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan dan pembinaan UMKM melihat dari program dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan dan Pembinaan pada tahap ini lebih banyak menggunakan data sekunder. Hasil kajian atau analisis dapat dijadikan masukan untuk Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan dan Pembinaan UMKM.

## HASIL

Usaha kecil menengah (UMK) di Provinsi Riau tumbuh menggembirakan khususnya di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2010-2014 tercatat sebanyak 482.192 pelaku usaha sektor ini. Trend positif pertumbuhan sektor UMKM. Sektor ini sepanjang 2010 tumbuh 2.94 persen. Dibandingkan pada 2009 lalu pelaku UKM di Provinsi Riau hanya 468.400 orang, maka pada akhir 2010 meningkat menjadi 482.193 orang yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Riau

Bahwa dari aspek kuantitas, Kota Pekanbaru menempati urutan pertama jumlah pelaku UKM tertinggi, yakni mencapai 93.093. Jumlah ini naik dari kurun 2009 yang tercatat hanya 89.723 orang atau sepanjang 2010 pelaku UKM di Pekanbaru naik 3.372 usahawan. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat sebagai daerah dengan jumlah pelaku UKM terendah. Hanya 10.898 orang. Meskipun dari sisi jumlah terendah, namun untuk pertumbuhan, Meranti tercatat paling tinggi, yakni mencapai 21.35 persen pada 2010 lalu, mengingat tahun sebelumnya hanya terdapat 8.981 pelaku UKM.

Usaha kecil menengah (UKM) selalu menjadi trending topik dalam

pertumbuhan perekonomian bangsa kedepan. Bagaimana tidak, UKM telah menunjukkan tajinya dalam mendominasi pertumbuhan perekonomian daerah. Sesuai dengan data Dinas Koperasi dan UKM Riau, untuk kota Pekanbaru misalnya pada tahun 2008 saja terdapat 67.728 UMKM dan terus meningkat setiap tahunnya. 67.728 UMKM di Pekanbaru tersebut bergerak di hampir seluruh lini usaha. Namun ada 4 lini dengan jumlah UMKM terbesar yang bergerak di sektor yang sama. Yaitu produksi (2.042 UMKM), perdagangan (12.345 UMKM), jasa (3.145 UMKM) dan industri (1.795 UMKM) dan sektor lainnya sebanyak 48.402 UMKM.

Sementara itu Data Diskop dan UKM Riau menyebutkan bahwa Pekanbaru dengan 68.728 UMKM-nya menempati posisi pertama dalam jumlah UMKM. Posisi kedua adalah Kampar dengan jumlah UMKM-nya sebanyak 45.446 UMKM. Inhil dengan 44.891 UMKM menempati posisi ketiga. Selanjutnya, Bengkalis (42.029 UMKM), Rohil (34.036 UMKM), Rohul (27.074 UMKM), Inhu (26.488 UMKM), Siak (22.948 UMKM), Kuansing (21.450 UMKM), Dumai (20.782 UMKM) dan Palalawan dengan 13.824 UMKM-nya menempati posisi juru kunci. Dari sejumlah UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Riau itu, sektor perdagangan dengan 77.156 UMKM menjadi sektor paling diminati dibandingkan dengan jasa (19.656 UMKM), produksi (12.760) dan industri dengan 11.320 UMKM-nya.

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Riau dinilai belum mampu mengembangkan berbagai usaha terutama dalam menghadapi persaingan bebas kawasan Asia Tenggara pada tahun 2016.

Belum mampunya UMKM di Riau dalam mengembangkan usaha yang ditekuninya tersebut karena keterbatasan pengetahuan dalam berusaha itu sendiri berdasarkan data perkembangan UMKM di Riau pada tahun 2013 terdapat total 526.800 pelaku usaha yang terdiri dari 369.140 pelaku usaha mikro, kemudian 149.533 pelaku usaha

kecil dan 7.127 pelaku usaha menengah. Masih banyak UMKM yang belum mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan mampan karena mereka memerlukan pelatihan di bidang usaha sehingga dengan sendirinya bisa membawa usaha yang mereka geluti ke arah lebih maju dan berkembang.

Saat ini di Provinsi Riau telah memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang siap melatih para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Namun masih sedikit dari total jumlah UMKM di Riau yang telah mendapat kesempatan untuk latihan. "Di PLUT ini, para pelaku dilatih cara membuat pembukuan, pengembangan usaha hingga pada hal-hal teknis seperti cara membuat label halal maupun berkode produk usahanya. Pelaku UMKM akan didampingi dan dibina sehingga benar-benar mampu mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru.

Selama tahun 2014, lanjutnya, PLUT sudah melakukan pelatihan terhadap UMKM di Riau sebanyak 48 kali dengan setiap pelatihan diikuti sebanyak 25 orang pelaku usaha. "Dengan demikian, selama tahun ini saja sudah sedikitnya 1.200 pelaku UMKM telah dibina dan dilatih di PLUT.

Pemerintah Provinsi Riau terus menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di berbagai wilayah kabupaten/kota di provinsi tersebut khususnya Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Ini sudah menjadi tugas pokok bagi pemerintah provinsi untuk menjadikan pelaku UMKM yang kuat dan mampu bertahan ditengah krisis sekalipun. Selain pembinaan, pemerintah provinsi ikut mempromosikan produk-produk UMKM hingga ke pemasaran dan berkomitmen memperbanyak pelaku usaha di Riau dengan menumbuhkembangkan mereka serta memberi bantuan modal, pelatihan, pemasaran hingga promosi.

Pemerintah Provinsi Riau sangat berkomitmen dalam memajukan Usaha



Menengah Kecil Mikro (UMKM) di daerah khususnya di Kota Pekanbaru. Komitmen ini sebagai wujud pemerintah daerah dalam mempersiapkan masyarakat Kota Pekanbaru menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2015.

Upaya Pemerintah dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang handal dan berkualitas di bidangnya dalam MEA. Hal ini meliputi berbagai sektor seperti Pemberdayaan dan Pembinaan, begitu juga peran penyuluh di tengah masyarakat yang berkontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah melalui produk inovasi dan kreatifitasnya.

Untuk komitmen menggali sektor UMKM dan Koperasi dari partisipasi peran penyuluh yang bersinergi dengan komitmen Pemerintah provinsi dan Pusat. Hal ini juga berkorelasi positif dengan upaya mewujudkan Asean Economic Community 2015. Dengan itu Pemerintah mengharapkan bagi setiap pelaku UMKM dapat siap dalam menghadapi persaingan nantinya. Untuk itu perlu penguatan SDM, salah satunya dari peran tenaga penyuluh di daerah dalam pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dalam menghadapi MEA.

UMKM di Riau khususnya di Kota Pekanbaru Harus Selalu Inovatif dan Kreatif, Persaingan pasar bebas Asia atau yang lebih dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) yang telah berjalan lebih kurang satu tahun ini. Waktu ini tak ayal membuat sejumlah pelaku UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) ketar-ketir dalam menghadapi Persaingan industri antar negara Asean. Termasuk pelaku UMKM di Kota Pekanbaru, yang sejatinya berada di posisi yang paling strategis, baik secara geografis, geoekonomi dan geopolitik. Khususnya Pekanbaru menurut belum begitu siap dan agak gamang dalam menghadapi MEA. Melihat kenyataannya, masih banyak pengusaha muda yang berpotensi tapi masih terhambat berbagai faktor. Seperti keterbatasan informasi, networking dan dana. Ditambah lagi masalah perizinan yang terbilang ribet.

Di Pekanbaru masalah perizinan masih sulit, artinya banyak birokrasi yang lumayan ribet dan prosesnya belum teredukasi ke semua UMKM. Masih banyak juga UMKM di Pekanbaru yang sebenarnya belum tahu apa maksudnya MEA, sebagai pelaku UMKM, harus lebih aktif dalam menghadapi MEA. Karena pangsa pasarnya bakal jadi dua kali lipat, begitu juga dengan persaingannya akan bertambah selama MEA berlangsung, berikutnya Kebijakan pemerintah ke depan hanya difokuskan untuk UMKM yang berpotensi untuk dimajukan.

## PEMBAHASAN

Jumlah Penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta orang (menurut sensus 2010), ternyata hanya 0,24 persen adalah para wirausaha (interpreneur), atau hanya sekitar 400.000 orang yang mau masuk dalam dunia usaha atau UMKM. Agar perekonomian Indonesia dapat berkembang lebih cepat diperlukan lebih dari 2 persen dari jumlah penduduk sebagai wirausaha atau yang mau Masuk dalam kegiatan UMKM. Dapat juga diperbandingkan dengan negara tetangga yang tidak punya sumber daya alam seperti Singapura mempunyai 7 persen dari jumlah penduduknya merupakan wirausaha dan mempunyai banyak UMKM.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia khususnya di kota Pekanbaru menurut data tahun 2010-2014 sesuai tabel 1.1 adanya peningkatan berkembangnya UMKM di ota Pekanbaru, ini tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan.

Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut,

UMKM adalah usaha produktif yang terpenuhinya kriteria usaha dengan batasan tertentu modal bersih dan hasil penjualan tahunan. Keberhasilan UMKM di Indonesia di kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan.

Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim yang dimiliki oleh pelaku UMKM tersebut, Pada dewasa ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan. KUR adalah Kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit atau Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan.

Pemerintah sebagai regulator, pada dasarnya telah banyak mengeluarkan program atau skim yang telah disediakan untuk memberdayakan UMKM. Program ini hendaknya terus dioptimalisasikan. Program-program tersebut antara lain: Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagaimana telah di bahas. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), KKPE adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui kelompok tani atau koperasi. Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)

UMKM di Kota Pekanbaru yang berjumlah 60 ribu lebih menurut data yang ada berpotensi diberdayakan oleh pemerintah kota Pekanbaru untuk meningkatkan daya saing unruk menghadapi MEA, dilihat dalam APBD Pemerintah Kota Pekanbaru yang menganggarkan Rp 9.176.358.890,00 (sesuai

dengan APBD Pemko Pekanbaru)

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan dan Pembinaan UMKM di kota Pknbaru terdapat enam hal yang menjadi prioritas strategi bagi UMKM dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Pertama, pemerintah telah mempermudah UMKM untuk mengakses permodalan baik program yang disedia oleh pemerintah maupun perbankan. Kedua, pemerintah kota peknabru belum maksimal memperluas jaringan pemasaran. Ketiga, pemerintah kota pekanbaru terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, pemerintah ota peknbaru menyediakan sarana dan prasarana usaha yang memadai di setiap kecamatan. Kelima, memaksimalkan iklim usaha yang kondusif, dan keenam, memberikan pelatihan teknologi yang tepat guna sesuai perkembangan teknologi dalam memperkenalkan produk yang dihasilkan. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan UMKM, harus mendorong tumbuhnya sentra-sentra UMKM dan sekaligus mempersiapkan tenaga ahli yang mengerti tentang bisnis. Terlebih lagi pada era persaingan global seperti sekarang ini, dimana UMKM dituntut harus menguasai teknologi dalam mengakses berbagai informasi tentang bisnis.

Dari semuanya dilakukan dengan selaras melalui pendekatan program (bukan proyek) pembinaan dan pemberdayaan, maka pertumbuhan UMKM yang spektakuler bukan sekadar mimpi lagi karena potensi pasar domestik dan pasar global merupakan peluang yang dapat dipenuhi oleh UMKM di negeri sendiri, bukan sebaliknya digarap oleh pengusaha dari negara lain.

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola untuk mengintegrasikan ekonomi di kawasan ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara sesama negara anggota ASEAN. Pada tahun lalu yang telah

diberlakukan pemerintah kota Pekanbaru harus menyiapkan masyarakat melalui pembinaan dalam hal UMKM yang bisa berdaya saing.

Dampak MEA ini sendiri cukup dirasakan di Kota Pekanbaru, bahkan makin menjamurnya produk makanan impor yang bukan berasal dari negara ASEAN, seperti Jepang, Cina, dan Korea kini mulai membanjiri pasar hingga toko pinggir jalan. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat kota Pekanbaru dalam memproduksi produk rumahan yang dihasilkan. Karena kebanyakan produk impor tersebut tidak mencantumkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara itu sesuai dengan hasil penelusuran di lapangan menunjukkan barang impor tersebut masuk melalui negara yang tergabung dalam kesepakatan MEA, yakni Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Pemerintah kota Pekanbaru hanya bisa mengawasi peredaran barang impor dari negara non-ASEAN tersebut. Karena dalam kesepakatan MEA tersebut, pemerintah daerah tidak bisa lagi melakukan pelarangan barang masuk dari negara ASEAN. Banyak UMKM di Riau yang kini tengah berjuang untuk terus memproduksi tentunya akan terkena dampak dari MEA. Dengan pasar bebas yang sudah di depan mata, tentunya para pelaku usaha mesti meningkatkan kualitas produknya agar tetap bertahan.

Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru harus mencanangkan program pengadaan rumah kemasan yang anggarannya berasal dari kas pemerintah pusat. Terkait hal tersebut, Kecamatan Payung Sekaki, Rumbai dan Tenayan Raya mengajukan daerahnya untuk dibangun rumah kemasan. Rumah kemasan sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang kemasan, baik itu konsultasi kemasan, desain kemasan hingga produksi kemasan produk itu sendiri.

Berdasarkan data terakhir Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru saat ini, ada sekitar 12.000 unit UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan sektor jasa seperti usaha kerajinan tenun, rotan,

songket, makanan kering dan kue. Banyak harus dibenahi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM di Pekanbaru seperti kemasan dan keahlian tenaga kerja harus siap dalam menghadapi MEA. Dalam menghadapi pasar persaingan bebas di kawasan Asia Tenggara itu, pihaknya sudah mengadakan pelatihan-pelatihan serta pembinaan kepada pelaku usaha terutama UMKM yang berada di Pekanbaru.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Fatkhurrahman (2018) yang menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan jaringan antara UMKM dengan dunia usaha. Jaringan kerja ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah agar UMKM dalam unggul.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil laporan kemajuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: Bahwa Pekanbaru sebagai kota yang memiliki iklim bisnis tinggi juga memiliki perkembangan bisnis UKM yang cukup baik. Jumlah UMKM di Pekanbaru menjadi jumlah terbanyak dibandingkan dengan jumlah UMKM di kabupaten/kota lainnya di Riau. Data Diskop dan UKM Riau menyebutkan bahwa Pekanbaru dengan 68.728 UMKM-nya menempati posisi pertama dalam jumlah UMKM. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Riau khususnya di Kota Pekanbaru dinilai belum mampu mengembangkan berbagai usaha terutama dalam menghadapi persaingan bebas kawasan Asia Tenggara pada tahun 2016. Di Pekanbaru masalah perizinan masih sulit, artinya banyak birokrasi yang lumayan ribet dan prosesnya belum tereduksi ke semua UMKM. Masih banyak juga UMKM di Pekanbaru yang sebenarnya belum tahu apa maksudnya MEA, Karena pangsa pasarnya bakal jadi dua kali lipat, begitu juga dengan persaingannya akan bertambah selama MEA berlangsung. Strategi Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM di Pemerintah Kota harus ditingkatkan lagi agar UMKM bisa berdaya saing dalam menghadapi pasar bebas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia. 2011. *Five Finger Philosophy: Upaya Memberdayakan UMKM*, Jakarta
- Fatkhurahman, N. P. M. (2018). *Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Kemitraan Terhadap Kebijakan Bisnis dan Kinerja Pengelola Serta Dampaknya Pada Keunggulan Bersaing Industri Kecil Makanan di Propinsi Riau* (Doctoral dissertation, Unpas).
- Inpres No. 3 tahun 2010 *Tentang. Program Pembangunan Yang Berkeadilan*. Presiden Republik Indonesia
- Kuncoro, M. 2009. *Dasar–Dasar Ekonomika Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mulyadi Nitisusastro, 2009, *Kewirausahaan &Manajemen Usaha Kecil*, penerbit Alfabeta Bandung
- Prawirokusumo, S, 1999, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi)*, Yogyakarta; BPFE
- Rahmana, Arief. 2008. *Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan tentang Usaha Kecil Menengah*, (online), (<http://infoukm.wordpress.com>, diakses 1 oktober 2011)
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Sabirin, S. 2001. *Pemanfaatan Kredit Mikro untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat di dalam Era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah Lustrum IX Universitas Andalas, Padang, 13 September 2001.
- Sudaryanto. 2011. *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness*. *International Journal of Education and Development, JEDICT*, Vol 7 No 1 halm. 56-67.